



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS AIRLANGGA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ENDANG DEWI MASITHAH**
2. Jabatan : **DEKAN**
3. NHK : **511984**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 2.175.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 179 m2/170 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 1.225.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 138 m2/130 m2 di KAB / KOTA GRESIK, HASIL SENDIRI Rp. 325.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 221 m2/200 m2 di KAB / KOTA PASURUAN, HASIL SENDIRI Rp. 625.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 615.000.000**

1. MOBIL, HONDA MOBILIO TIPE E Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000
2. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
3. MOBIL, TOYOTA INNOVA REBORN TYPE G Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 280.000.000
4. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
5. MOBIL, MITSUBISHI XPANDER Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 230.572.500**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ---**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 264.469.665**



F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 3.285.042.165

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.285.042.165

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.